

**Judul** : Nomor "Cantik" Jadi Incaran Bakal Calon  
**Tanggal** : Rabu, 19 April 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## Nomor "Cantik" Jadi Incaran Bakal Caleg

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, raihan suara terbanyak yang menentukan keterpilihan caleg. Namun, nomor urut "cantik" teratas tetap diincar.

**JAKARTA, KOMPAS** — Meski bakal bertarung di pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sebagian bakal calon anggota legislatif masih mengincar nomor urut "cantik", seperti nomor urut teratas di surat suara karena kerap diasosiasikan dengan peluang kemenangan. Sejumlah partai membuat aturan ketat untuk mengantisipasi persaingan yang bisa menyebabkan gesekan internal.

Pematangan daftar calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 di sejumlah partai politik menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada 1-14 Mei 2023 mulai bergerak, mulai dari urusan jumlah, administrasi, hingga penentuan nomor urut di kertas suara.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo, mengatakan, pihaknya sudah menuntaskan pengisian daftar caleg di seluruh tingkatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia mengakui penentuan nomor urut masih diwarnai perebutan di antara para bakal caleg. Meski tidak terjadi dalam jumlah besar, ada bakal caleg yang meminta nomor urut tertentu, umumnya yang teratas, karena mengasosiasikannya dengan peluang kemenangan. "Kalau terjadi (rebutan nomor urut), itu masih ada, tetapi tidak banyak," kata Arif, Selasa (18/4/2023), di Jakarta.

Ia menambahkan, hal itu terjadi karena bakal caleg tak paham aturan internal partai mengenai pencalonan anggota legislatif. Padahal, PDI-P memiliki peraturan tentang



Arief Wibowo

pencalonan anggota legislatif yang di antaranya mengatur tata cara perekrutan, seleksi, dan penetapan nomor urut.

Untuk menentukan nomor urut caleg, partai akan melakukan pemeringkatan skor yang dilihat dari beberapa hal. Misalnya, jabatan di parpol, kualifikasi kader, dan rekam jejak selama menjadi anggota partai. Bahkan, penilaian lebih rinci dilakukan untuk para bakal caleg petahana, yakni dengan melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran selama mereka menjabat.

"Kalau ada satu-dua konflik kecil, perbedaan pendapat, kita jelaskan. Karena ini ada alat ukurnya, kita punya peraturan yang mengatur mekanisme rekrutmen dan seleksinya. Ada sistem *scoring*, kualifikasi kader, jadi komplet," katanya.

### Peluang kemenangan

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membenarkan penentuan nomor urut caleg kerap jadi persoalan tersendiri. Hal ini karena nomor urut selalu dikaitkan dengan kemudahan sosialisasi dan peluang kemenangan. Namun, hal ter-

sebut tidak pernah mencuat hingga menjadi konflik di internal PAN karena sudah diantisipasi melalui peraturan partai.

Dalam Peraturan PAN tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kata Viva, disebutkan penentuan nomor urut didasarkan pada sistem skor dengan beberapa indikator. "Itu diatur detail, terukur, rasional, dan obyektif. Jadi, semua bakal caleg bisa mengukur dirinya sendiri," katanya.

Terpisah, Ketua Badan Penanganan Pemilu DPP Partai Nasdem Effendy Choirie mengungkapkan, dalam peraturan partai telah diatur kriteria seperti apa bagi caleg untuk mendapat prioritas nomor urut atas. Prioritas pertama adalah caleg petahana. Kedua, caleg itu merupakan pengurus partai, baik di dewan pimpinan pusat maupun di dewan pimpinan wilayah. Ketiga, caleg itu dianggap memiliki keistimewaan atau nilai yang berbeda dibandingkan dengan caleg lain, misalnya caleg tersebut telah memiliki basis massa atau jejaring sosial yang kuat di wilayah tersebut karena ketokohnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga berhati-hati menentukan nomor urut. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menuturkan, caleg yang dianggap lebih memiliki kemampuan politik dan jejaring sosial biasanya diberi nomor urut atas. Namun, hal ini juga terkadang memicu konflik karena caleg lain biasanya juga merasa punya jejaring sosial kuat, tetapi diberi nomor urut bawah.

Dalam situasi ini, DPP PKB berusaha bersikap obyektif. Partai akan memanggil caleg-caleg tersebut dan menggelar pertemuan bersama. "Kami sudah punya tim yang juga melakukan kerja *mapping* dan memastikan tak terjadi konflik itu. Itulah caranya agar bisa berkompetisi dengan partai lain. Jadi, partai hanya bisa berkompetisi dengan partai lain jika partai itu mampu menuntaskan dulu konsolidasi internal antarcabangnya. Kalau itu tidak terjadi, yang terjadi malah caleg makan partai dan sendiri di internal partai," kata Huda.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhani, menuturkan, persepsi pemilih saat ini masih menganggap caleg dengan nomor "cantik" sebagai tokoh-tokoh yang diutamakan partai dan berkualitas. Padahal, hal ini hanya persoalan persepsi. Pada akhirnya, dalam sistem proporsional terbuka, keterpilihan seorang caleg tetap ditentukan oleh perolehan suara terbanyak.

Menurut Fadli, perlu juga dijelaskan kepada masyarakat nomor urut tidaklah berpengaruh terhadap keterpilihan caleg dan tidak mencerminkan kualitas caleg. "Pilihlah caleg yang kemudian betul-betul bisa membangun keterkaitan programatik dan berdialog dengan pemilih. Mereka yang bisa menjalankan fungsi representasi dan menjangkau aspirasi. Mau dia nomor berapa pun, dalam sistem proporsional terbuka, peluang dia sama, sepanjang mendapat suara terbanyak," katanya. (NIA BOW)